

Judul : Tambah Dana Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun: Pemerintah Penuhi Permintaan Petani
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Tambah Dana Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun Pemerintah Penuhi Permintaan Petani

Senayan menilai kebijakan Pemerintah menambah alokasi dana pupuk subsidi tahun 2024 sebesar Rp 14 triliun sudah tepat. Kebijakan positif ini bakal meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, penambahan anggaran pupuk subsidi ini merupakan permintaan petani.

"Faktanya memang kebutuhan pupuk ini cukup besar," kata Firman kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (9/1/2024).

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga perlu menata ulang metodologi penyaluran pupuk subsidi ke petani. Sebab, metodologi sekarang kurang efektif. Diusulkan, penyaluran pupuk subsidi ini lebih fokus menyentuh ke komoditi tanaman pangan saja dengan luas lahan maksimal dua hektare.

"Dulu kan di tahun 2009, kebijakan waktu saya menjadi Pimpinan Komisi IV itu alokasi pupuk subsidi untuk tanaman pangan tertentu, fokusnya untuk tanaman padi. Dan luas lahannya

juga 2 hektare dan harus pemilik, bukan penyewa," jelasnya.

Sekarang, ucapnya, pengalokasian pupuk subsidi semakin luas. Bukan hanya menyasar petani padi, tapi juga untuk petani hortikultura, petani singkong, tebu dan tanaman-tanaman lainnya yang sebenarnya, secara penggunaan lahan, rata-rata petaninya di atas dua hektare.

"Karena itu, penataan ini menjadi penting. Tidak mungkin negara mampu mengalokasikan dana pupuk subsidi sesuai kebutuhan," katanya.

Selain membatasi petani berhak menerima pupuk subsidi, menurutnya, sistem penyaluran pupuk dengan kartu tani ini juga baiknya diperketat. Sebab, temuan di lapangan, kartu tani ini justru memicu banyak penyimpangan di lapangan oleh pihak pengecer dan distribu-

tor. Lantaran, petani malah menyerahkan kartu tani beserta *Personal Identification Number* (PIN)-nya ke para pengecer pupuk.

"Yang terjadi ketika petani itu harusnya mendapat alokasi (pupuk subsidi) 200 kilogram, kemudian baru ditebus 50 kilogram, nebus berikutnya jatahnya sudah habis. Sama pengecernya, ditimbulkannya jadi nonsubsidi. Ini fakta di lapangan," ungkapnya.

Karena itu, dia mendorong agar penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi ini dievaluasi. Bahkan jika perlu, dibatalkan dan dibuatkan metodologi lain yang lebih tepat sasaran.

Firman pun mendukung kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memudahkan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan kartu identitas atau KTP. Sekarang sudah kombinasi. Bagi mereka yang sudah bisa menggunakan kartu tani itu berlanjut.

"Tapi yang tidak bisa menggunakan (kartu tani) bisa pakai KTP. Ini sudah ada surat edaran

dari Pak Dirjen (Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian) atas perintah Pak Menteri, bahwa sekarang kita menggunakan IPubers-nya Pupuk Indonesia. Jadi orang bisa datang bawa KTP saja," jelasnya.

Sementara, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri memastikan ketersediaan pupuk untuk Masa Tanam (MT) I pada Oktober 2023 hingga Maret 2024 mencukupi.

Dengan total target tanam seluas 6,3 juta hektare, maka pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

"Dengan sisa target tanam Januari-Februari 2024 seluas 3,9 juta hektare, kebutuhan pupuk sekitar 1,6 juta ton. Jadi, ketersediaan pupuk 1,7 juta ton masih mencukupi," ungkap Boga.

Boga mengatakan, dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk MT I, maka anggaran tambahan Rp 14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi akan di-

alokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Mentan telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden telah menyetujui," jelasnya.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujarnya.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, petani bisa berproduksi dengan baik.

Menurutnya, Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi, sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial.

"Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya. ■ KAL